

EKONOMI EKOLOGIS PAUS FRANSISKUS

MARTIN HARUN¹

Guru Besar Emeritus STF Driyarkara, Jakarta
E-mail: marharun@gmail.com

S. STEWART BRAUN²

Australian Catholic University, Brisbane, Australia
E-mail: stewart.braun@acu.edu.au

Abstract: This article outlines, first, Pope Francis' economic vision which is both practical and radical. His views are practical in the sense that they are sensitive to social realities, not theoretical abstractions; and radical in the sense that it rejects traditional economic ideologies. Pope Francis advocates for economic practices that are oriented toward human goals: the common good, human dignity, equality and opportunity for all, meaningful work, ecological responsibility and solidarity. Second, Pope Francis' various criticisms of neoliberal capitalism essentially challenge what is called "economic rationality," namely a way of thinking that is characteristic of capitalism, which reduces normative and evaluative thinking into measurable economic categories.

Keywords: ecology, Pope Francis, practical and radical criticism, neoliberal economics, quantitative assessment, ethical assessment, human goals.

Abstrak: Artikel ini menguraikan, *pertama*, visi ekonomis Paus Fransiskus yang bersifat praktis dan radikal. Pandangannya praktis dalam arti bahwa peka terhadap realitas sosial, bukan abstraksi teoretis; dan radikal dalam arti bahwa ia menolak pelbagai ideologi ekonomi

-
- 1 Gagasan pokok dalam karangan ini pernah dipresentasikan Martin Harun dalam Webinar " *Laudato Si*. Aksi Platform Indonesia" (26 Juni 2022) tentang Ekonomi Fransiskus. Presentasi itu secara intensif menggunakan dan juga mengembangkan bagian pertama artikel S. Stewart Braun, "Pope Francis and Economic Democracy: Understanding Pope Francis's Radical (yet) Practical Approach to Political Economy," *Theological Studies* 81, no. 1 (2020), pp. 203-224. <https://doi.org/10.1177/0040563920907077>. Martin Harun menambahkan referensi dan keterangan dari ensiklik *Fratelli Tutti* yang belum terbit pada saat Braun menulis artikelnya.
 - 2 S. Stewart Braun is lecturer and head of Australian Catholic University School of Philosophy.

tradisional. Paus Fransiskus memperjuangkan praktik ekonomi yang yang berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan: kesejahteraan umum, martabat manusia, kesetaraan dan peluang bagi semua, pekerjaan yang bermakna, tanggung jawab ekologis, dan solidaritas. *Kedua*, pelbagai kritik Paus Fransiskus terhadap kapitalisme neoliberal pada intinya menantang apa yang disebut “rasionalitas ekonomis,” yakni cara berpikir yang karakteristik dalam paham kapitalisme, yang mereduksi pemikiran normatif dan evaluatif menjadi kategori-kategori ekonomis yang dapat diukur.

Kata-kata Kunci: ekonomi, ekologi, Paus Fransiskus, ekonomi neoliberal, penilaian kuantitatif, penilaian etis, tujuan-tujuan kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Pernyataan-pernyataan Paus Fransiskus dalam *Evangelii Gaudium* (selanjutnya EG), *Laudato Si'* (LS), dan *Fratelli Tutti* (FT)¹ telah membarui perdebatan mengenai ajaran sosial Gereja Katolik menyangkut ekonomi politis dan keadilan ekonomis. Kritiknya terhadap sistem ekonomi kapitalis menuai kritik dari beberapa orang yang khawatir bahwa kritik Paus bisa meruntuhkan ekonomi pasar dan/atau membahayakan kesejahteraan ekonomis. Ada kritikus yang menuduh bahwa Paus gagal memahami sejarah ekonomi atau realitas ekonomi saat ini,² dan hanya berpegang pada pemahaman lokal (Argentina/Peronisme) tentang ekonomi,³ serta berprasangka negatif terhadap kegiatan bisnis pasar dan kewirausahaan.⁴

1 Dalam *Fratelli Tutti* (FT), yang merupakan penjabaran terpadu dari topik-topik ajaran sosial gereja yang telah disampaikan Paus Fransiskus pada aneka kesempatan selama 2013-2020, visi tentang ekonomi disampaikan dalam konteks pengembangan budaya persaudaraan dan cinta kasih sosial yang inklusif, yang merangkul semua, khususnya mereka yang dalam sistem sosio-politik dan ekonomi saat ini diabaikan

2 Lihat Robert M. Whaples, “The Economics of Pope Francis: An Introduction,” *The Independent Review* 21, no. 3 (2017), pp. 325–345, https://www.independent.org/pdf/tir/tir_21_03_01_whaples.pdf.

3 Samuel Gregg, “Understanding Pope Francis: Argentina, Economic Failure and the *Teologia del Pueblo*,” *The Independent Review* 21, no. 3 (2017), pp. 361–374, https://www.independent.org/pdf/tir/tir_21_03_03_gregg.pdf.

4 Lihat Andrew M. Yuengert, “Pope Francis, His Predecessors, and the Market,” *The Independent Review* 21, no. 3 (2017), pp. 347–360, http://www.independent.org:80/pdf/tir/tir_21_3_02_yuengart.pdf.

Kekhawatiran para kritikus ini memperlihatkan kesalahpahaman mereka tentang proyek Paus Fransiskus, yang mereka pandang sebagai ideologi ekonomis yang anti-pasar. Hal itu sama sekali tidak menjadi maksud Paus Fransiskus. Kritiknya tidak menantang legitimitas ekonomi yang berorientasi pasar, tetapi bermaksud memperlihatkan kekurangan besar pada paradigma kapitalis neoliberal saat ini, dan menyarankan proses-proses sosial ekonomis yang tanggap terhadap nilai-nilai dasar yang dipegang Gereja, termasuk kesejahteraan umum, martabat manusia, kesetaraan dan peluang bagi semua, pekerjaan yang bermakna dan bermartabat, tanggung jawab ekologis, dan solidaritas.⁵

Di bawah ini akan ditunjukkan cara Paus Fransiskus mengkritik kapitalisme neoliberal; dan hendak diselidiki tema-tema dasar yang menyatukan aneka kritiknya itu. Akan dibahas dua hal kunci. *Pertama*, Paus Fransiskus menawarkan kritik “radikal” namun “praktis” terhadap kapitalisme neoliberal. Pandangannya praktis dalam arti bahwa peka terhadap realitas sosial, bukan abstraksi teoretis. Pandangannya juga radikal dalam arti menjauhi ideologi ekonomis dan tradisi politis yang pada saat ini dominan. *Kedua*, berbagai kritik Paus Fransiskus terhadap kapitalisme neoliberal menyatu dalam menantang apa yang disebut oleh ahli teori sosial André Gorz (*Critique of Economic Reason*, 1989) sebagai “rasionalitas ekonomis.”⁶ Seperti yang akan kami tunjukkan, rasionalisasi/penghe-

5 Pentingnya nilai-nilai dasar tersebut diungkapkan kembali oleh Paus Fransiskus dalam *Fratelli Tutti* §106-111, di mana beliau memikirkan dan merancang suatu dunia bersaudara yang terbuka untuk semua. Setiap manusia itu berharga dan berhak untuk hidup bermartabat dan berkembang (FT §106-107). Karena itu diperlukan kehadiran dan tindakan negara dan lembaga-lembaga masyarakat yang melampaui tuntutan kebebasan individualistis dan ukuran efisiensi kuantitatif, dan yang menjamin peluang pendidikan, pekerjaan, usaha, dst. kepada masyarakat miskin dan kaum penyandang disabilitas (FT §108-110). Menuntut hak individual secara individualistis menurut Paus berakar dalam konsep manusia yang dilepaskan dari konteks sosial dan antropologisnya (FT §111). Lalu, dalam FT §118-120, diuraikan visi gereja mengenai fungsi sosial dan tujuan universal harta milik, yang pertama-tama diperuntukkan bagi semua. Hak milik pribadi diakui tetapi hanya sebagai hak sekunder, dan bukan hak mutlak.

6 Karena *economic reasoning/rationality* (rasionalitas atau kerasionalan ekonomis) secara praktis menjadi tampak dalam rasionalisasi (penghematan) kuantitatif, istilah itu dalam beberapa konteks akan diterjemahkan sebagai ‘rasionalisasi ekonomis’ yang lebih mudah dimengerti. Meskipun Paus Fransiskus hampir pasti tidak dipengaruhi oleh André Gorz, namun Braun menganggap Gorz di sini berguna karena sebagai ilmu-

matan ekonomis adalah buah cara berpikir yang karakteristik untuk kapitalisme, di mana pemikiran normatif dan evaluatif direduksi menjadi kategori-kategori ekonomi yang dapat diukur.

KRITIK RADIKAL DAN PRAKTIS PAUS FRANSISKUS

Dalam dokumen *Evangelii Gaudium*, *Laudato Si'*, dan *Fratelli Tutti* Paus Fransiskus memberikan kritiknya terhadap sistem kapitalis dewasa ini⁷ yang berbentuk neoliberal.⁸ Kritik itu bersifat sekaligus praktis dan radikal. Praktis, karena berfokus pada realitas ekonomi serta dampaknya pada masyarakat dan lingkungan hidup seperti yang saat ini secara nyata dialami manusia. Radikal, karena – berbeda dengan banyak pemikiran dalam ekonomi politis – Paus Fransiskus tidak berkomitmen pada salah satu perspektif ideologis yang mengevaluasi segalanya dari sudut satu nilai dominan tertentu.

wan sekular pemikirannya tidak dapat diabaikan sebagai “teologis.” Oleh karena itu, menganalisis kritik Paus Fransiskus dalam terang konsep Gorz sangat membantu dalam menjembatani kesenjangan antara perspektif sekular dan perspektif teologis.

7 Dalam *Fratelli Tutti*, kritik itu secara kompak dilontarkan dalam §163-169, tempat Paus Fransiskus membicarakan nilai dan batasan pandangan liberal yang cenderung individualis dan menuntut kebebasan seraya mengabaikan konsep bangsa dan nilai-nilai komunal dan budaya (FT §163). Budaya individualis dalam kaitan dengan kegiatan ekonomis – yang diinginkan tanpa aturan – lupa akan kelemahan manusia yang cenderung mementingkan dirinya (FT §166). Dunia tidak mampu dengan sendirinya menyelesaikan semua masalah, tanpa komitmen pada pengembangan sikap solidaritas dan kedalaman spiritual (FT §167). Neoliberalisme dengan teorinya bahwa kekayaan dengan sendirinya akan ‘spill over’ dan ‘trickle down’ ke masyarakat miskin, secara nyata tak berhasil menyelesaikan masalah ketidakadilan. Diperlukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendorong keragaman produksi dan kreativitas kewirausahaan untuk menambah lapangan kerja. Pasar hanya akan mampu melaksanakan fungsi ekonomis yang tepat bila ada solidaritas dan saling percaya (FT §168; juga §114-117). Sistem ekonomi yang selama ini tidak memberi tempat kepada banyaknya pekerja yang informal atau tidak tetap, dan para penganggur, perlu diganti dengan ekonomi partisipatif yang melibatkan orang-orang yang tersisih itu, demi pembangunan manusia seutuhnya. Kebijakan sosial untuk orang miskin harus diatasi menjadi kebijakan-kebijakan bersama-sama dengan mereka (FT §169).

8 Dengan istilah ‘neoliberal’ dimaksudkan pandangan ekonomi yang mendorong sistem pasar kapitalis, yang mengevaluasi keadaan dengan ukuran produktivitas dan keuntungan ekonomi. Neoliberal tidak sama dengan “libertarian” karena kaum neoliberal bersedia menggunakan intervensi pemerintah untuk mengoreksi keadaan bila terjadi kegagalan pasar.

Menurut dia, kita tidak boleh, di satu sisi, menerima visi lazim neo-liberal bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara ajaib menyelesaikan semua masalah, dan kita juga, di sisi lain, tidak boleh terbawa oleh klaim bahwa lebih banyak intervensi pemerintah dan program bantuan dapat menjamin hal-hal seperti martabat manusia dan kesejahteraan umum (FT §161). Perlu disadari bahwa “tumbuhnya keadilan membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, meskipun mengandaikannya”, sebab membutuhkan “kemajuan seutuhnya orang-orang miskin yang meminta lebih daripada pemberian bantuan saja” (EG §204; bdk. FT §21). Pendekatan Paus Fransiskus terhadap masalah sosial ekonomi dipandu bukan oleh sebuah ideologi ekonomis yang berlaku umum – entah itu ideologi bantuan sosial atau ideologi neoliberal atau pun ideologi Marxis⁹ – tetapi oleh kenyataan praktis bahwa ekonomi saat ini gagal menjamin kesejahteraan umum, martabat manusia, kesetaraan dan peluang bagi semua, solidaritas, tanggung jawab ekologis, dan pekerjaan yang bermakna dan bermartabat (singkatnya, “tujuan-tujuan kemanusiaan”).

Komponen penting dalam pendekatan praktis namun radikal Paus Fransiskus adalah penolakannya untuk menerima kapitalisme dalam bentuknya yang sekarang sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan yang bernilai. Dengan kata lain, ia tidak beranggapan bahwa sistem kapitalis saat ini adalah sistem ekonomi terbaik dan bahwa sudah cukup bila diadakan beberapa koreksi terhadap kekurangan atau kegagalan tertentu untuk mencapai hasil yang konsisten dengan ajaran sosial Gereja Katolik. Sebaliknya, ia menekankan bahwa ekonomi harus dijadikan etis, dan pelbagai struktur serta kebijakan ekonomi perlu dirancang kembali untuk menjamin tujuan-tujuan kemanusiaan yang mendasar, bahkan bila efisiensi dalam beberapa segi bisa berkurang. Misalnya, dalam EG ia mengklaim bahwa “martabat setiap pribadi manusia dan usaha kesejahteraan umum adalah keprihatinan yang harus menentukan

9 Pemikiran Marxis dalam arti tertentu membebaskan individu dan masyarakat dari tanggung jawab terhadap kegagalan sosial ekonomis karena proses itu bersifat impersonal. Sebaliknya, Paus Fransiskus mengambil pendekatan yang personal, yang menemukan penyebab masalah sosial ekonomi dalam kegagalan orang untuk mengadakan penilaian etis.

semua kebijakan ekonomi” (EG §203; bdk. FT §122). Dalam LS §189, ia menegaskan bahwa “politik tidak harus tunduk pada ekonomi, dan ekonomi tidak harus tunduk pada perintah atau paradigma efisiensi teknologi” (bdk. juga FT §177).

Namun, sementara Paus Fransiskus menyalahkan perspektif ekonomi neoliberal karena gagal memperhatikan tujuan-tujuan kemanusiaan yang mendasar, kritiknya tidak menyalahkan kegiatan ekonomi atau pasar secara lebih umum. Di beberapa tempat ia mencatat pentingnya pertumbuhan ekonomi yang dikelola dengan baik (EG §204; LS §109) dan kewirausahaan yang bertanggung jawab (LS §129; FT §123). Ia juga mengapresiasi peran penting teknologi dalam meningkatkan kehidupan banyak orang (LS §102; FT §29). Keprihatinan utamanya diarahkan kepada masyarakat yang begitu mudah tunduk kepada perintah-perintah aneka bentuk kapitalisme neoliberal, yang membuat masyarakat buta terhadap ketidaksetaraan dalam peluang-peluang dasar dan akses kepada barang-barang, buta terhadap masalah keberlanjutan lingkungan hidup serta kemerosotan komunitas dan solidaritas manusia.

INTERPRETASI RHONHEIMER TENTANG AJARAN SOSIAL KATOLIK

Kritik Paus Fransiskus juga menjadi teguran terhadap interpretasi tentang ajaran sosial Katolik seperti yang akhir-akhir ini disajikan oleh Martin Rhonheimer dan dulu oleh Michael Novak. Mereka menegaskan bahwa sistem pasar yang relatif bebas dan efisien adalah cara terbaik untuk menjamin kesejahteraan dan sekaligus tujuan-tujuan kemanusiaan yang penting.¹⁰ Meskipun pandangan mereka tidak neoliberal dalam arti ketat karena Novak dan Rhonheimer mengakui peran penting tujuan-tujuan kemanusiaan, pandangan mereka jelas dipengaruhi oleh perspektif ekonomi neoliberal karena sangat menekankan pentingnya pasar kapitalis yang berjalan tanpa banyak aturan. Hal itu jelas dari ca-

¹⁰ Lihat M. Rhonheimer, *The Common Good of Constitutional Democracy: Essays in Political Philosophy and on Catholic Social Teaching*. Trans. William F. Murphy, Jr. Washington, DC: Catholic University of America, 2013, bab XIV; juga Michael Novak, *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: The Free Press, 1993).

tatan-catatan Rhonheimer sebagai berikut:

Kebijakan negara mestinya bertujuan membuat pasar menjadi sarana efisien dengan menjamin bahwa mekanisme pasar berfungsi secara benar. Ini tidak sama dengan menciptakan “keadilan sosial” tetapi dengan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan individual dan alokasi sumber-sumber daya secara efisien. . . Tidak seorang pun sesungguhnya dapat mendefinisikan dengan jelas isi “keadilan sosial”, karena – dalam dunia dengan sumber daya yang terbatas dan bahkan langka, keadilan sosial adalah soal yang pada dasarnya sangat kontroversial.¹¹

Dan selanjutnya, tulis Rhonheimer:

Keadilan sosial dan cinta kasih sosial ... barangkali memperbaiki hasil proses pasar atau mengimbangi efek samping yang tidak diinginkan. Akan tetapi, keduanya tidak dapat menggantikan persaingan bebas dan sistem harga – mengikuti hukum penawaran dan permintaan – sebagai prinsip pengarah dan pengaturan ekonomi tanpa sangat merugikan kesejahteraan umum.¹²

Di sini, tekanan Rhonheimer ada pada upaya memastikan bahwa sistem pasar kapitalis berfungsi dengan lancar sebagai sarana untuk menyediakan barang dan jasa yang dikiranya akan mendukung juga tujuan-tujuan kemanusiaan. Intervensi hanya dapat diterima sebagai sarana untuk mengoreksi kegagalan pasar dan memastikan distribusi sumber daya yang memadai. Jadi, meskipun Rhonheimer bukan seorang neoliberal, ia tampaknya menerima gagasan bahwa bentuk kapitalisme neoliberal adalah sistem ekonomi terbaik. Dari sudut pandangnya, pendekatan ekonomi pasar yang relatif lepas tangan menjamin efisiensi yang produktif, dan dianggap sebagai cara terbaik untuk mengamankan kesejahteraan manusia. Masalahnya di sini adalah bahwa pendekatan ini tampak mengadopsi kepercayaan neoliberal pada efisiensi pasar modal, sementara perhatian untuk keadilan sosial hanya dipandang sebagai perkara korektif saja.

11 M. Rhonheimer, *The Common Good of Constitutional Democracy*, p. 471.

12 M. Rhonheimer, *The Common Good of Constitutional Democracy*, p. 484.

PENDEKATAN YANG SANGAT BERBEDA

Jelas bahwa pendekatan Paus Fransiskus terhadap ekonomi sangat berbeda dari pemahaman Rhonheimer. Menurut Paus, struktur dan kebijakan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan harus diubah. Kita harus melakukan lebih dari sekadar mengupayakan bentuk-bentuk koreksi kesejahteraan atau distribusi ulang. Ia menyatakan,

Perlunya mengatasi sebab-sebab struktural kemiskinan tidak dapat ditunda, bukan hanya karena alasan pragmatis bahwa hal itu mendesak demi kesejahteraan masyarakat, tetapi karena masyarakat memerlukan penyembuhan dari luka-luka yang menjadikannya lemah serta tak layak, dan hanya dapat mengarah ke krisis baru. Rencana-rencana bantuan untuk mengatasi beberapa kebutuhan yang mendesak hendaknya dipertimbangkan hanya sebagai jawaban sementara. Selama masalah-masalah kaum miskin tidak dipecahkan secara tuntas *dengan menolak otonomi mutlak dari pasar serta spekulasi keuangan dan dengan mengatasi sebab-sebab struktural ketidaksetaraan*, tidak akan ditemukan pemecahan bagi masalah-masalah dunia Ketidaksetaraan adalah akar penyakit-penyakit sosial. (EG §202; huruf miring dari Braun).

Berbeda dengan Rhonheimer dll. yang mengutamakan performa sistem pasar kapitalis, Paus Fransiskus mendesak revisi struktur dan kebijakan ekonomi sehingga kemalangan berupa kemiskinan dan ketidaksetaraan tidak akan muncul seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis dewasa ini. Dengan kata lain, ia mengupayakan transformasi sistem ekonomi agar kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat diatasi secara organik, dan bukan sekedar melalui tindakan perbaikan yang tambal sulam. Inilah salah satu alasan mengapa dalam kutipan di atas dan di beberapa tempat lain ia menekankan hal “mengatasi sebab-sebab struktural kemiskinan” dan ketidaksetaraan. (Lihat juga LS §52, EG §188; FT §21-22, 179).

Lebih dari itu, ia dengan jelas menekankan pentingnya konsep keadilan. Misalnya, seperti dikutip sebelumnya, ia mengklaim bahwa “pertumbuhan dalam keadilan memerlukan lebih daripada sekadar pertumbuhan ekonomis;” untuk itu dibutuhkan “keputusan-keputusan, program-program, mekanisme-mekanisme, serta proses-proses yang me-

macu pemerataan pendapatan yang lebih baik, penciptaan kesempatan kerja dan kemajuan seutuhnya orang-orang miskin, hal mana melampaui pemberian bantuan [karitatif] belaka” (EG §204). Jadi, berbeda dengan analisis Rhonheimer, keadilan ekonomi bagi Paus Fransiskus bukanlah konsep kosong yang mengizinkan perdebatan tanpa akhir, tetapi konsep mendasar yang memberi arah kepada cara berekonomi. Tentu saja, ia tidak bermaksud menyangkal kenyataan bahwa ada banyak perdebatan tentang sifat sistem ekonomi yang adil. Namun, seperti yang akan dijelaskan di bagian berikut, ia memberikan petunjuk-petunjuk tegas tentang rupa suatu ekonomi yang adil dan apa saja yang termasuk di dalamnya.

KRITIK TERHADAP NEOLIBERALISME SEBAGAI IDEOLOGI

Paus Fransiskus mengkritik sistem kapitalis neoliberal saat ini sebagai suatu sistem yang ideologis. Apa yang sesungguhnya menjadikannya ideologis, dan mengapa ideologi itu menjadi penghalang bagi pendekatan alternatif yang bisa lebih langsung terfokus pada sasaran-sasaran kemanusiaan? Di sini – menurut Braun – sangat membantu bila analisis dan kritik Paus Fransiskus dikaitkan dengan konsep “kerasionalan ekonomis” (*economic reason/rationality*) seperti yang dikembangkan dalam kritik pembaharu sosial André Gorz.¹³

Menurut Gorz, “kerasionalan ekonomis” mewakili suatu cara berpikir yang dominan dalam masyarakat kapitalis, yang dicirikan oleh penekanan obsesif pada efisiensi produksi, pelipatgandaan, perhitungan, dan keuntungan. Nilai atau signifikansi ditetapkan secara kuantitatif dengan mengukur hal-hal seperti jumlah jam yang dihemat, jumlah barang yang diproduksi atau dimiliki, dan banyaknya keuntungan yang diperoleh. Menurut Gorz, kerasionalan ekonomis mendorong orang untuk bersikap “makin banyak makin baik” (“the more is better attitude”). Deskripsinya layak dikutip lengkap:

Dalam kapitalisme, gairah rasionalisasi (*rationalizing passion*) bertindak otonom sehubungan dengan penetapan semua sasaran. Rasiona-

13 André Gorz, *Critique of Economic Reason*, trans. Gillian Handyside and Chris Turner (New York: Verso, 1989), pp. 109ff.

lisasi itu memunculkan sebuah ukuran objektif untuk menetapkan efisiensi usaha dan keberhasilannya, yakni besarnya keuntungan. Oleh karena itu, kesuksesan tidak lagi menjadi masalah evaluasi pribadi dan soal "kualitas hidup", sukses diukur dari jumlah uang yang diperoleh, dari akumulasi kekayaan. Kuantifikasi memunculkan kriteria yang tak terbantahkan dan skala hierarkis yang tidak memerlukan validasi oleh otoritas mana pun, norma apa pun, skala nilai apa pun. Efisiensi dapat diukur dan, dengan demikian, juga kemampuan dan kebajikan setiap individu: lebih banyak selalu lebih baik ketimbang lebih sedikit, maka mereka yang menghasilkan lebih banyak adalah lebih baik daripada mereka yang berpenghasilan lebih sedikit.¹⁴

Bagi Gorz, rasionalisasi ekonomis ini bersifat invasif. Karena penilaian kuantitatif relatif mudah dan tidak tunduk pada ketidaksepakatan evaluatif, cara-cara manusia menetapkan nilai akhirnya diganti dengan penilaian kuantitatif itu sehingga orang akhirnya mengadakan evaluasi dengan menghitung hasil ekonomis yang terukur.

Akibatnya, seperti yang dikatakan Gorz, rasionalisasi ekonomis menggantikan sistem-sistem evaluatif moral kita dan penilaian personal (*personal value judgements*).

Pengukuran kuantitatif yang mengganti penilaian dengan akal budi, memberikan keamanan intelektual dan kenyamanan moral: kebaikan menjadi terukur dan dapat dihitung, keputusan dan penilaian moral dapat mengalir dari penerapan prosedur perhitungan kuantitatif objektif impersonal¹⁵.

Dan selanjutnya, Gorz menegaskan:

Dengan rasionalisasi seperti itu, kegiatan ekonomis selanjutnya dapat mengatur perilaku manusia dan hubungan antarmanusia "secara objektif", dengan mengabaikan subjektivitas para pembuat keputusan dan tantangan moral yang bisa diajukan. Tidak ada lagi masalah baik atau jahat, tetapi hanya perhitungan yang tepat. "Ilmu ekonomi," sejauh memandu pengambilan keputusan dan perilaku, membebaskan

14 André Gorz, *Critique of Economic Reason*, p. 113.

15 André Gorz, *Critique of Economic Reason*, p. 121.

orang dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka menjadi “abdi modal” dengan menerapkan rasionalisasi ekonomis¹⁶.

Dengan demikian, rasionalisasi ekonomis menetapkan dirinya sebagai wasit otonom atas segala nilai. Sasaran-sasaran hidup manusia yang menyangkut moral dan agama, diabaikan atau dikategorikan dalam ranah ekonomis. Karena rasionalisasi ekonomis, manusia harus dilayani dengan peningkatan produktivitas, harta, dan aneka opsi konsumsi. Ironisnya, proses perhitungan ini dipromosikan sebagai hal yang membebaskan. Karena ukuran ekonomis kekayaan dan produktivitas menyediakan ukuran nilai yang jelas dan sudah tentu, orang dan masyarakat tidak lagi perlu bingung tentang sasaran-sasaran yang harus mereka kejar atau validitas normatif dan etis kehidupan atau pilihan-pilihan sosial. Sasaran-sasaran masyarakat dan masing-masing anggotanya sudah ditata dan didefinisikan dalam terminologi keberhasilan ekonomis yang terukur, seperti PDB (produk domestik bruto).¹⁷

Ini menghasilkan suatu masyarakat yang sepenuhnya mengabdikan pada kekayaan materi dan efisiensi produktif, tetapi tidak memiliki kesadaran kritis atau sistem evaluatif normatif yang memungkinkan untuk menilai secara koheren pentingnya nilai-nilai non-ekonomis. Akibatnya, kerasionalan ekonomis tak mampu melihat pentingnya tujuan-tujuan kemanusiaan seperti kesejahteraan umum, martabat manusia, kesetaraan dan peluang bagi semua, pekerjaan yang bermakna atau bermartabat, solidaritas, dan tanggung jawab ekologis, karena semuanya itu tidak mudah diukur dari sudut kuantitas.

Meskipun Paus Fransiskus tidak akan setuju dengan setiap pandangan filosofis Gorz, namun bahaya yang melekat pada rasionalisasi ekonomis, seperti yang diidentifikasi Gorz, membantu untuk mengerti kekhawatiran Paus Fransiskus tentang dampak sosial dari kapitalisme

16 André Gorz, *Critique of Economic Reason*, p. 122.

17 Proses penilaian terukur diterapkan di berbagai bidang sosial. Misalnya, mutu perawatan kesehatan sering diukur secara objektif dalam terminologi tahun-tahun hidup, atau perawatan lingkungan hidup sering dinilai melalui analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*).

neoliberal. Selain itu, gagasan Gorz tampak berkaitan dengan beberapa pemikir yang secara langsung mempengaruhi Paus Fransiskus, terutama Romano Guardini¹⁸. Misalnya, dalam analisisnya tentang kekuasaan manusia yang disampaikan dalam *Power and Responsibility*, Guardini berpendapat bahwa aspek-aspek koersif kekuasaan sering “disembunyikan di balik aspek-aspek ‘kegunaan’, ‘kemakmuran’, ‘kemajuan’, dan seterusnya. Jadi kekuasaan akhirnya dijalankan dengan cara yang tidak ditentukan oleh etika. Contohnya yang paling jelas adalah korporasi bisnis yang anonim”.¹⁹ Jadi, seperti Gorz menyatakan bahwa rasionalisasi ekonomis menggantikan penilaian etis, Guardini menegaskan bahwa kekuasaan digunakan secara tidak tepat ketika diterima atas dasar kemajuan ekonomis saja, tanpa ditambah pertimbangan etis. Baik pada Guardini maupun pada Gorz, kita menemukan kekhawatiran mendalam akan bahaya bila secara eksklusif diandalkan penilaian kemajuan ekonomis atau utilitarian.

Kritik Gorz terhadap “rasionalisasi ekonomis” dan penilaian Guardini tentang kuasa anonim bergema dalam pernyataan-pernyataan Paus Fransiskus. Ketika ia mengatakan bahwa “anak lembu emas yang lama (Kel. 32:1-35) telah kembali dalam bentuk baru dan kejam di dalam pemujaan uang dan kediktatoran ekonomi impersonal yang tidak memiliki tujuan kemanusiaan sejati ... dan mereduksi manusia ke salah satu kebutuhannya saja: konsumsi” (EG §55), ia bisa ditafsirkan telah menunjukkan bagaimana manusia dan masyarakat dibutakan oleh rasionalisasi ekonomis dan diseret oleh daya tarik keuntungan materiil. Uang, efisiensi produktif, dan kemajuan teknologi telah memantapkan diri sebagai nilai-nilai dominan sementara kompleksitas moral, sosial, dan psikologis dari pribadi manusia, beserta tujuan-tujuannya, diabaikan atau tidak diperhitungkan.

18 Lihat Massimo Borghesi, *The Mind of Pope Francis: Jorge Mario Bergoglio's Intellectual Journey* (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2018), bab III.

19 Romano Guardini, *Power and Responsibility*, trans. Elinor C. Briefs (Chicago: Henry Regnery), pp. 14-15.

Karena kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dominan, cara berpikir ekonomis telah merembes ke dalam banyak segi kehidupan dan pemikiran sosial sehari-hari. Misalnya, menurut Paus Fransiskus, “Budaya kemakmuran telah mematikan perasaan kita; kita bergairah ketika pasar menawarkan sesuatu yang baru untuk dibeli; dan pada saat yang sama orang-orang yang hidupnya terhambat karena kurangnya peluang, tampaknya sekadar menjadi tontonan belaka yang tak mampu menggerakkan hati kita” (EG §54; bdk. FT §125 di mana mati rasa yang sama disinyalir dalam relasi antarbangsa atau antarwilayah). Maka, baginya kapitalisme dengan rasionalisasi ekonomisnya, telah mendistorsi sistem penilaian manusia dan kepekaan etis. Manusia telah kehilangan visinya terhadap tujuan-tujuan kemanusiaan yang utama, kebutuhan orang lain, dan hal-hal yang penting bagi perkembangan manusia.

KRITIK TERHADAP “PARADIGMA TEKNOKRATIS”

Konsep kerasionalan ekonomis Gorz dan penilaian Guardini tentang kekuasaan juga dapat membantu dalam memahami kritik Paus Fransiskus terhadap “paradigma teknokratis” yang disampaikan dalam *Laudato Si’* (LS §106-114). Dalam kritiknya, diungkapkan kekhawatiran bahwa kemajuan teknologi dibuat “hanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kemungkinan dampak negatifnya terhadap manusia” (LS §109; bdk. FT §33). Kekhawatiran ini dijelaskan dalam kaitan dengan rasionalisasi ekonomis dan penilaian Guardini tentang kekuasaan: karena teknologi meningkatkan produktivitas dan mengarah pada penciptaan komoditas baru yang dianggap memajukan masyarakat, dan segala produknya sering diterima tanpa memikirkan biaya dan beban nonekonomi. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa Paus Fransiskus di sini tidak menentang kemajuan teknologi pada umumnya, tetapi mengharapkan pendekatan yang lebih bertanggung jawab dan bijaksana, yang mempertimbangkan dampak teknologi terhadap tujuan-tujuan kemanusiaan dan hubungan antarmanusia.

Dalam pandangannya, kemajuan teknologi harus lebih terintegrasi secara holistik ke dalam kehidupan manusia dan harus memperhati-

kan nilai-nilai nonekonomi. Misalnya, ia menegaskan bahwa “tujuannya bukanlah agar kemajuan teknologi semakin menggantikan tenaga kerja manusia, karena dengan demikian manusia akan merugikan dirinya” (LS §128) dan mengakibatkan “perluasan dunia kemiskinan” (FT §20). Sebaliknya, “pekerjaan harus menjadi tempat pengembangan pribadi manusia dalam pelbagai dimensi kehidupan yang penting: kreativitas, perencanaan masa depan, pengembangan bakat, penghayatan nilai-nilai, komunikasi dengan orang lain, dan sikap menyembah Allah” (LS §127; bdk. FT §162). Oleh karena itu, kita didesak untuk memberikan gambaran tentang kemajuan yang lebih lengkap dan lebih mendalam dengan mengukur kemajuan tidak hanya dari segi efisiensi produktif atau penguasaan teknologi, tetapi terutama dari segi perkembangan manusia.

KESIMPULAN: SOLUSINYA BUKAN IDEOLOGI

Upaya Paus Fransiskus dapat diartikan sebagai kritik terhadap rasionalisasi ekonomis yang dianut oleh neoliberalisme yang kini sedemikian dominan sehingga kerangka berpikir etis dikesampingkan. Apa solusinya? Sesuai dengan pendekatannya yang praktis dan radikal, ia tidak menawarkan ideologi alternatif. Pada intinya, lewat pesannya Paus mendesak kita untuk mengembangkan struktur-struktur ekonomi dan mekanisme sosial apa pun yang mampu menjamin kesejahteraan umum, martabat manusia, kesetaraan dan peluang bagi semua, pekerjaan yang bermakna dan bermartabat, solidaritas, dan keutuhan lingkungan hidup. Dengan kata lain, ia menyatakan bahwa kriteria nonekonomis harus digunakan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Seperti yang dinyatakannya, “terhadap banyak masalah konkret, pada prinsipnya, Gereja tidak memiliki dasar untuk menawarkan sebuah pendapat definitif. Gereja tahu bahwa ia harus mendengarkan dan mendorong debat tulus di antara para ilmuwan, sambil menghormati keragaman pendapat” (LS §61). Jadi intinya bukanlah memberi resep solusi spesifik, tetapi mengungkapkan kealpaan yang diciptakan oleh kerasionalan ekonomis, dalam upaya untuk memulihkan perspektif yang lebih etis, dan lebih responsif terhadap tujuan-tujuan kemanusiaan yang penting.

Paus Fransiskus mengambil jalur praktis, peka terhadap realitas dunia. Dia menyadari bahaya untuk mengadopsi pendekatan doktriner terhadap masalah sosial ekonomis, sadar bahwa hal itu dapat menyebabkan ketergantungan ideologis pada ide atau sistem yang akhirnya akan membatasi pilihan-pilihan ke depan dan tidak cukup fleksibel. Ini sesuai dengan salah satu prinsip inti pemikirannya, yaitu prinsip bahwa “kenyataan lebih penting daripada gagasan” (EG §231). Baginya, aneka ideologi mengekang secara intelektual dan normatif, dan dapat membutakan individu terhadap kenyataan di lapangan²⁰. Komitmen ideologis hanya mengakibatkan bahwa analisis malah terhambat dan segala masalah sosial dan ekonomi bisa dimanipulasi agar sesuai dengan narasi yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti misalnya dalam kasus neoliberalisme, di mana tujuan-tujuan kemanusiaan yang nonekonomis dikuantifikasi dengan ukuran ekonomis. Analisis yang diadakan secara ideologis seperti itu, menghasilkan pandangan yang kerdil dan karikatural tentang masalah-masalah sosial dan solusi-solusinya. Tujuan dokumen *Evangelii Gaudium*, *Laudato Si'*, dan *Fratelli Tutti* antara lain adalah mengungkap bahaya semacam ini.

Pendekatan Paus Fransiskus terhadap masalah ekonomi juga bersifat radikal. *Pertama*, karena menolak aneka asumsi teoretis yang mencirikan diskursus tentang sistem ekonomi yang dipakai saat ini. Persoalannya bukanlah teoretis: apakah negara harus lebih atau kurang terlibat dalam pengaturan kehidupan ekonomi; apakah teori ekonomi tertentu adalah yang terbaik. Persoalannya praktis: menetapkan bagaimana struktur-struktur ekonomi dan sosial dengan baik dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan kemanusiaan yang penting sementara responsif terhadap realitas dunia. *Kedua*, dalam kritiknya terhadap neoliberalisme, Paus Fransiskus menawarkan tantangan radikal terhadap sistem rasionalisasi ekonomis yang sedang berlaku dan yang telah menular ke cara berpikir sosial dan tidak menyisakan banyak ruang untuk nilai-nilai kemanusiaan. Sekali lagi, solusinya bukanlah sebuah ideologi ekonomi yang baru, tetapi pengembangan cara-cara berpikir dan evaluasi yang berorientasi

20 Massimo Borghesi, *The Mind of Pope Francis*, bab III.

pada ide-ide kesejahteraan umum, martabat manusia, pekerjaan yang bermakna, kesetaraan dan peluang bagi semua, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. *Ketiga*, radikal karena tidak ada upaya untuk menetapkan solusi spesifik yang menjawab segalanya; sebaliknya ada upaya menunjukkan secara praktis bahwa perlu dikembangkan kebijakan-kebijakan fleksibel yang andal, berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan, dan peka terhadap kebutuhan manusia.²¹

DAFTAR RUJUKAN

- Borghesi, Massimo. *The Mind of Pope Francis: Jorge Mario Bergoglio's Intellectual Journey*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2018.
- Braun, S. Stewart. "Pope Francis and Economic Democracy: Understanding Pope Francis's Radical (yet) Practical Approach to Political Economy." *Theological Studies* 81, no. 1 (2020): 203-224. <https://doi.org/10.1177/0040563920907077>.
- Gorz, André. *Critique of Economic Reason*. Trans. Gillian Handyside and Chris Turner. New York: Verso, 1989.
- Guardini, Romano. *Power and Responsibility*. Trans. Elinor C. Briefs. Chicago: Henry Regnery, 1961.
- Paus Fransiskus. *Evangelii Gaudium (Sukacita Injil), Seruan Apostolik tentang Pewartaan Injil kepada Dunia Dewasa Ini*, 24 November, 2013. <https://www.dokpenkwi.org/2017/08/29/seri-dokumen-gerejawi-no-94-evangelii-gaudium-sukacita-injil/>
- Paus Fransiskus. *Laudato Si' (Terpujilah Engkau), Ensiklik tentang Perawatan Rumah Kita Bersama*, 24 Mei, 2015. <https://www.dokpenkwi.org/2017/08/29/seri-dokumen-gerejawi-no-98-laudato-si-terpujilah-engkau/>
- Paus Fransiskus. *Fratelli Tutti (Saudara Sekalian), Ensiklik tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial*, 3 Oktober 2020. <https://www.dokpenkwi.org/2021/04/26/seri-dokumen-gerejawi-no-124-fratelli-tutti/>

21 Dalam bagian kedua artikel "Pope Francis and Economic Democracy", Stewart Braun melengkapi visi Paus Fransiskus dengan penjelasan ekonomis dan filosofis yang lebih konkret, yang sering disebut "demokrasi ekonomis." Dalam demokrasi ekonomis, yang digalinya dari karya-karya John Rawls, James Meade, John Roemer, dan Marc Fleurbaey, modal tidak lagi terkonsentrasi di tangan bank swasta atau investor, tetapi dalam bentuk tunai, saham, properti riil, atau aset produktif lainnya tersebar luas sehingga memberikan lebih banyak kuasa kepada para pekerja dan masyarakat umum atas aspek-aspek penting pembangunan sosial-ekonomis.

Rhonheimer, Martin. *The Common Good of Constitutional Democracy: Essays in Political Philosophy and on Catholic Social Teaching*. Trans. William F. Murphy, Jr. Washington, DC: Catholic University of America, 2013.